



Evaluasi Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital

Fournely Aritasia Siahaan¹, Bismar Arianto², Ella Afnira³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

2105010047@student.umrah.ac.id¹, abimcantik3@gmail.com², ellaafnira29@gmail.com³

Alamat: Jl. Raya Dompok, Kel. Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang,
Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: 2105010047@student.umrah.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of the Public Internet Program in Tanjungpinang City in supporting digital inclusion. Based on the 2018-2023 Strategic Plan document from the target of 100 points, only 34 public wifi points were realized. The evaluation was carried out using the theory of William N Dunn (2003), using six indicators, namely, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of 12 informants. The results of this study indicate that the implementation of the program has been running but not optimal. This can be seen in the effectiveness indicator where the placement of access points is less strategic, because it is located in upper-class housing which generally already has its own internet access, then the network quality is less stable with the bandwidth provided of 20 Mbps through a scramble system where the ideal standard according to the IT perspective is 2 Mbps per user outside watching YouTube. In the efficiency indicator, from 2013-2023 the realization did not reach the target set at the beginning, then the lack of maintenance resulted in 8 internet points not working. The adequacy indicator has not been said to be optimal in meeting needs through value, opportunity, and method adjustment as evidenced by the fact that there is no national standard as a reference in program implementation and unclear location data collection. In the equity indicator, there is a mismatch in infrastructure facilities, small areas have not been reached, and there is 1 location point that is locked. The responsiveness indicator is good, but there is still low participation from the community. Finally, the accuracy indicator is directed towards the community, but the implementation is not in accordance with the needs, and has not reached the initial target.*

Keywords: *Program Evaluation, Public Internet, Communication and Information Technology.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam mendukung inklusi digital. Berdasarkan dokumen Renstra tahun 2018-2023 dari target 100 titik, yang terealisasi hanya 34 titik wifi publik. Evaluasi dilakukan menggunakan teori dari William N Dunn (2003), dengan menggunakan enam indikator yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 12 orang informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada indikator efektivitas di mana penempatan titik akses yang kurang strategis, karena terletak di perumahan kelas atas yang umumnya sudah memiliki akses internet sendiri, kemudian kualitas jaringan yang kurang stabil dengan bandwidth yang disediakan sebesar 20 Mbps dengan sistem rebutan di mana standar ideal menurut perspektif IT ialah sebesar 2 Mbps per pengguna diluar menonton youtube. Pada indikator efisiensi, dari tahun 2013-2023 perealisasiannya tidak mencapai target yang ditentukan di awal, kemudian kurangnya pemeliharaan menghasilkan 8 titik internet tidak berfungsi. Pada Indikator kecukupan belum dikatakan optimal dalam memenuhi kebutuhan melalui nilai, kesempatan, dan penyesuaian metode yang dibuktikan dengan belum ada standar nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan pendataan lokasi yang kurang jelas. Pada indikator pemerataan ditemukan ketidaksesuaian sarana infrastruktur, belum terjangkaunya wilayah kecil, dan terdapat 1 titik lokasi yang terkunci. Pada indikator responsivitas tergolong baik, namun masih rendahnya partisipasi dari masyarakat. Terakhir, pada indikator ketepatan sudah mengarah kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum mencapai target awal.

Kata kunci: Evaluasi Program, Internet Publik, Komunikasi dan Informatika.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan solusi untuk mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik yang mengarah pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan *e-government* terhadap birokrasi bertujuan untuk memberikan alternatif birokrasi dalam penyampaian layanan yang lebih baik, selain itu *e-government* juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara umum *e-government* dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses pemerintahan dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemberian layanan. Menurut Hole (2011) Secara konseptual, sebenarnya konsep *dasar e-government* ialah penyampaian layanan melalui perangkat elektronik (*e-services*) seperti internet, jaringan selular, komputer dan multimedia. Adanya perkembangan *e-government* sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik juga ditata ulang untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Nugraha, 2018).

Internet adalah dunia teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang. Internet juga telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi penggunaanya seperti menemukan, memperoleh, mengarsipkan, mengolah, mengirim, mendistribusikan data dan informasi dengan cepat dan mudah, serta dapat membangun interaksi antar individu.

Mengacu pada visi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang (Kominfo) dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, yang tertuang dalam Renstra OPD Dinas Kominfo Tahun 2018-2023, dan Masterplan Tanjungpinang Smart city Tahun 2019 yaitu “Tanjungpinang Sebagai Kota Yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera Dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani” berupaya memberikan layanan internet gratis bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dengan tujuan untuk mendukung inklusi digital yang dapat dilihat dari salah satu uraian tugas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan online dengan mudah, aman, kreatif, dan produktif, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Tanpa Kabel (*Wireless*) pada program kewajiban universal.

Pembangunan program jaringan internet publik ini sudah berjalan sekitar 10 tahun, dengan target 100 titik hotspot publik, yang berada di beberapa lokasi, seperti fasum perumahan, taman, dan gedung kantor pemerintah dan dapat di akses selama 24 jam sehingga

diharapkan program ini dapat menjangkau semua wilayah Kota Tanjungpinang. Meskipun tujuan program ini baik untuk memudahkan akses informasi dan transformasi masyarakat, dalam pengimplementasiannya belum sepenuhnya optimal, di mana realisasi dari program ini dari 2018 hingga akhir periode 2023 hanya mencapai 34 titik di mana kendala utamanya adalah terbatasnya anggaran, selain itu juga masyarakat belum banyak mengetahui program ini dan belum terbiasa memanfaatkan internet publik. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program internet publik di Kota Tanjungpinang dalam mendukung inklusi digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi

Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai bagaimana suatu hal berfungsi, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memilih alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan. Menurut Arikunto, evaluasi artinya kegiatan mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu bekerja dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menentukan tindakan yang tepat ketika mengambil keputusan (Septiani, 2020).

Definisi lain menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan penelitian secara sistematis yang melibatkan pemberian nilai, atribut, apresiasi, identifikasi masalah, dan pemberian solusi untuk memahami apakah objek yang diteliti berfungsi dengan baik dan membuahkan hasil yang diharapkan mengkaji pencapaian standar pendidikan nasional (Cahyono et al., 2021). Menurut Winarno (2012:229) dalam (Hasbullah & Anam, 2019) evaluasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian suatu kebijakan, termasuk substansi, implementasi, dan dampaknya. Namun, beberapa ahli berpendapat sebaliknya bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari proses kebijakan publik. Nugroho mengklasifikasikan evaluasi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Evaluasi Administratif, meliputi penilaian terhadap efisiensi biaya penyelenggaraan anggaran dan proses kebijakan internal pemerintah, yang meliputi:
 - a. *Effort Evaluation*, menilai aspek masukan suatu program untuk pengembangan kebijakan.
 - b. *Performance Evaluation*, menilai hasil dari program yang dijalankan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.
 - c. *Adequacy Of Performance Evaluation* atau *Effectiveness Evaluation*, menilai sejauh mana program dilaksanakan sudah sesuai dengan tujuan dan arahan kebijakan.

- d. *Efficiency Evaluation*, mengevaluasi pengeluaran biaya program serta menilai efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
- e. *Process Evaluations*, yang memberikan penilaian terhadap metode yang digunakan oleh organisasi dalam pelaksanaan program.
2. Evaluasi Judicial, berkaitan dengan aspek legalitas kebijakan yang diterapkan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap hukum, konstitusi, etika, aturan administrasi negara, dan hak asasi manusia.
3. Evaluasi Politik, menilai tingkat penerimaan kebijakan oleh para konstituen atau aktor politik dalam proses implementasinya.

Menurut William N. Dunn (2003) Evaluasi memiliki enam indikator atau kriteria yang dikembangkan diantaranya:

1. Efektivitas, yang menitikberatkan pada nilai dari hasil program atau tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang dimaksud pada saat pelaksanaan kebijakan. Setelah program atau kebijakan publik dilaksanakan, apakah dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini dan memperoleh tujuan yang diinginkan, jika tidak maka kebijakan tersebut dianggap gagal atau membutuhkan waktu panjang untuk memperoleh efektivitas yang diharapkan.
2. Efisiensi, adalah penggunaan sumber daya yang paling sedikit untuk memperoleh hasil yang ideal. Efisiensi berkaitan dengan tingkat usaha yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Indikator efisiensi menunjukkan adanya standar hubungan antara masukan dan keluaran.
3. Kecukupan, adalah sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang menimbulkan masalah. Kecukupan dapat dikatakan berhasil jika tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
4. Perataan, mencakup faktor biaya, manfaat dan aksesibilitas merupakan faktor yang mengukur tingkat kesamaan suatu kebijakan. Kebijakan yang berfokus pada prinsip keadilan adalah kebijakan yang mengalokasikan hasil atau usaha secara merata. Suatu program dapat dianggap efektif, efisien, dan memadai jika manfaat dan biayanya dialokasikan secara adil diantara kelompok masyarakat, serta pendanaannya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat merasakan dampaknya.
5. Responsivitas, menitikberatkan pada kemampuan suatu kebijakan dalam menjawab kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai dari kelompok tertentu dalam masyarakat. Kriteria ini sangat krusial, karena meskipun kebijakan telah memenuhi aspek lain seperti

efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, tetap akan dinilai gagal apabila tidak mampu mengakomodasi kebutuhan riil kelompok sasaran.

6. Ketepatan, sebuah kebijakan atau program pada akhir yang digunakan untuk memeriksa apakah target yang ditetapkan konsisten dengan rencana awal. Ketepatan mengacu pada sejauh mana hasil (tujuan) yang diinginkan berguna dan penting bagi masyarakat (Fachrunisa et al., 2021).

Internet Publik

Internet Secara harfiah ialah kumpulan komputer di seluruh dunia yang terhubung dalam suatu jaringan. Pengertian internet dalam buku (Rusito, 2021) merupakan kumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs web pribadi, akademik, pemerintah, perusahaan, organisasi dan lainnya, dan internet juga menyediakan akses layanan telekomunikasi dan sumber informasi tanpa adanya batas yang mencakup komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi dalam bentuk berita (*usenet, milis*, dan sumber informasi terdistribusi *www, gopher*), login jarak jauh dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*). Adapun standar global dalam menggunakan internet sendiri ialah memakai Internet Protocol atau Transmission Control Protocol (*IP/TCP*) (Apriyanti et al., 2022).

Arief Ramadhan dalam bukunya menyatakan bahwa Internet singkatan dari *Interconnected Network*, ialah suatu sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai jaringan pada komputer di seluruh penjuru dunia. Adapun penjelasan mengenai manfaat dan peran yang cukup besar diantaranya:

1. Internet berperan sebagai pusat informasi yang menyajikan data lengkap dan relevan dari berbagai belahan dunia
2. Internet sebagai sarana komunikasi. Sebagai media komunikasi, internet memungkinkan interaksi yang cepat dan hemat biaya.
3. Internet sebagai sumber belajar, sebagai media pembelajaran, internet berhasil menjadi perpustakaan global atau taman baca mendunia yang didalamnya meliputi segala bidang ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat dapat memperluas pengetahuan dan pemahamannya dengan membaca informasi yang ada melalui internet (Wulansari, 2021).

Inklusi Digital

Sanders (2020) berpendapat bahwa inklusi digital diartikan sebagai partisipasi semua kelompok masyarakat dalam mengatasi tantangan terkait peluang, akses, pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, khususnya internet. Ada beberapa istilah lain

yang memiliki makna serupa dengan inklusi digital dan memiliki interpretasi yang sama, seperti kompetensi digital, partisipasi digital, dan literasi digital. Menurut *The Wales Co-operative Center with Carnegie UK Trust* (2018), hal ini pada dasarnya menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, khususnya internet, untuk meningkatkan kehidupan mereka dan membantu mereka mengatasi kesenjangan lainnya. Menurut Dijk (2005) aspek kunci dalam mencapai inklusi digital mencakup akses terhadap motivasi, akses terhadap material, akses terhadap keterampilan, dan akses terhadap kegunaan (Poerwanti et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ialah, agar mempermudah peneliti menganalisis, melakukan penilaian, dan penggambaran mengenai Program Internet Publik Di Kota Tanjungpinang Dalam Mendukung Inklusi Digital melalui 6 (enam) indikator pada teori evaluasi William N. Dunn (2003). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian akan di analisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program internet publik merupakan salah satu elemen penting dalam menyediakan pelayanan publik, sebagai sarana penyampaian informasi dan layanan publik dengan tujuan untuk memperbaiki, mendorong, dan meningkatkan kualitas, serta pemanfaatan teknologi informatika dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik bagi masyarakat yang akan peneliti jabarkan, deskripsikan dan analisis secara mendalam serta menyeluruh mengenai data yang telah diperoleh berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan kepada peneliti. Peneliti menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn (2003) dengan 6 (enam) indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan untuk mengevaluasi Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital.

Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berfokus pada keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program, yang diukur melalui produk/layanan. Indikator ini mengevaluasi dengan mengkaji mengenai hasil dari pelaksanaan program internet publik apakah dapat memecahkan masalah khususnya pada bagian akses internet, titik akses, dan kualitas jaringan internet jika tidak maka program

ini dianggap gagal atau membutuhkan waktu panjang untuk memperoleh efektivitas dalam menentukan kualitas dan kuantitas yang diharapkan dalam mencapai tujuan dari program ini.

Berdasarkan indikator efektivitas menunjukkan Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah utama yang terletak pada kualitas jaringan yang masih rendah, lokasi pemasangan yang kurang tepat karena lebih banyak di pasang di area masyarakat kelas atas yang sudah memiliki akses internet, serta kestabilan koneksi yang buruk seperti kecepatan yang lambat, dan koneksi yang sering terputus. Meskipun ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, program ini belum sepenuhnya mencapai tujuannya yaitu untuk mendukung inklusi digital karena belum mampu mengatasi permasalahan akses internet di kalangan masyarakat yang membutuhkan, selain itu kebutuhan *bandwidth* yang belum sesuai dengan jumlah pengguna di lokasi juga menyebabkan layanan internet publik menjadi tidak maksimal.

Efisiensi

Efisiensi pada dasarnya berfokus dengan seberapa besar sumber daya ataupun usaha yang digunakan dalam mencapai hasil yang optimal. Indikator ini mengevaluasi dengan mengkaji mengenai waktu, biaya yang digunakan dalam menyediakan akses internet, pemanfaatan sarana, monitoring pelaksana program. Berdasarkan indikator efisiensi menunjukkan bahwa Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital belum optimal dan efisien karena meskipun biaya pemasangan dan pemeliharaan per titik relatif rendah, akan tetapi realisasi akses internet belum mencapai target, selain itu juga program ini tidak memiliki tenggat waktu pelaksanaan yang jelas. Kemudian hambatan efisiensi juga muncul dari kurangnya tenaga, perangkat, serta sistem pengawasan dan pemeliharaan yang masih bergantung pada laporan masyarakat, di mana hal ini menyebabkan keterlambatan penanganan masalah di lapangan yang terbukti dari 34 titik hanya 24 titik yang aktif dan berfungsi.

Kecukupan

Kecukupan pada dasarnya berfokus dengan seberapa jauh tingkat dari efektivitas memenuhi kebutuhan, nilai dan kesempatan terhadap pemecahan suatu permasalahan. Kecukupan dapat dikatakan berhasil jika tujuan yang dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Berdasarkan indikator kecukupan menunjukkan bahwa Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital belum terlihat optimal dan mencukupi. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya standar nasional yang digunakan sebagai acuan, keterbatasan jaringan fiber optik, tingginya biaya pemasangan di wilayah terpencil dan penentuan lokasi pemasangan yang belum tepat karena masih banyak titik yang berada di area

masyarakat yang sudah memiliki akses internet sendiri, sehingga mengakibatkan manfaat dari program kurang dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan tujuan dari pengadaan program untuk mendukung inklusi digital belum dapat tercapai.

Perataan

Indikator ini merupakan indikator yang mengevaluasi dan berorientasi pada keadilan yang mencakup indikator efektivitas, efisiensi dan kecukupan, yang mana suatu program akan efektif, efisiensi, dan memadai apabila didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Berdasarkan indikator perataan menunjukkan bahwa Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital dapat dikatakan belum optimal karena dalam dalam pelaksanaan program ini masih banyak keterbatasan seperti biaya operasional, belum meratanya sarana infrastruktur yang maksimal sehingga perlu adanya koordinasi dan pemetaan ulang dari pihak pemerintah dan provider dalam pemenuhan kebutuhan anggaran. Kemudian penentuan lokasi pemasangan internet publik terutama pada wilayah terpencil dengan ekonomi yang belum stabil dan tingkat kesadaran masyarakat yang minim dalam permintaan pengadaan program ini juga memperlambat dalam menjangkau wilayah kecil yang ada di Kota Tanjungpinang.

Responsivitas

Responsivitas ini merupakan indikator yang memastikan keberhasilan dari indikator lainnya dalam adanya suatu program berdasarkan kepuasan dari masyarakat melalui tanggapan masyarakat dalam merasakan dampak adanya suatu program, di mana suatu kebijakan dianggap gagal jika tidak memenuhi kebutuhan aktual kelompok yang seharusnya mendapatkan manfaat dari keberadaan program tersebut. Berdasarkan indikator responsivitas menunjukkan bahwa Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital tergolong optimal karena mendapat respon yang baik dan mendukung dari masyarakat melalui saran ataupun masukan karena dianggap hal positif bagi masyarakat, akan tetapi dalam keberlanjutan dan pengelolaan jaringan internet publik yang menjadi hambatan dan tantangan dalam program ini adalah ketergantungan pada jaringan yang dimiliki oleh provider swasta selain itu juga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pengembangan program ini yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan internet publik.

Ketepatan

Indikator ketepatan ini berfokus pada tujuan dari suatu program untuk memastikan apakah sudah bernilai dan target yang ditetapkan masih konsisten dengan rencana awal, jika iya maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Ketepatan ini juga mengacu pada nilai

atau tujuan suatu program, dan kekuatan anggapan yang melatarbelakangi tujuan tersebut, dan keberhasilan dari indikator ini mencakup semua indikator yang relevan dan berkelanjutan. Berdasarkan indikator ketepatan menunjukkan bahwa Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital sudah tepat dalam penargetan sasaran, yaitu seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang dan telah memberikan manfaat berupa pemerataan layanan internet, akan tetapi penempatan lokasi yang ditempatkan di kawasan perumahan kelas atas dan kualitas jaringan yang belum optimal, serta efektivitas dari program masih perlu ditingkatkan melalui perluasan akses di ruang publik, edukasi masyarakat, pengembangan infrastruktur serta pemeliharaan yang rutin agar tujuan dari program benar-benar tercapai dan bermanfaat.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Evaluasi Program Internet Publik di Kota Tanjungpinang dalam Mendukung Inklusi Digital sudah berjalan namun belum optimal, karena dalam pelaksanaannya masih ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti keterkaitan dari keseluruhan indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang didukung dengan kualitas jaringan yang masih kurang, keterbatasan anggaran, dan minimnya kesadaran masyarakat yang membuat permintaan pemasangan internet publik menjadi lambat untuk menjangkau masyarakat.

Saran

- a. Efektivitas: DISKOMINFO Kota Tanjungpinang diharapkan dapat menetapkan indikator dalam menentukan keberhasilan, melakukan survei berkala dan memastikan infrastruktur bersama provider mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Efisiensi: DISKOMINFO diharapkan dapat melakukan audit, pengawasan, dalam penggunaan anggaran serta sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal.
- c. Kecukupan: DISKOMINFO diharapkan dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian target seperti, pengukuran kualitas jaringan, serta pembaruan infrastruktur terutama di daerah yang sulit di jangkau.
- d. Pemerataan: DISKOMINFO diharapkan dapat membuat pemetaan digital terhadap titik akses dan infrastruktur, serta menargetkan wilayah yang belum terjangkau karena kendala geografis.

- e. Responsivitas: DISKOMINFO diharapkan mengadakan sosialisasi dan membuat sistem pengaduan online, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan memberi masukan terhadap layanan.
- f. Ketepatan: DISKOMINFO diharapkan melakukan kajian terhadap preferensi masyarakat dalam penyesuaian teknologi sesuai dengan kondisi geografis

6. DAFTAR REFERENSI

- Apriyanti, W., Erni, Syahlanisyiam, M., Anggraini, Y., Gunawan, S., Arinanto, R. T., Fauzan, R. A., Suban, N. T., Asmat, Affandi, A., & L, A. (2022). Sosialisasi Penggunaan Internet Yang Sehat Bagi Anak – 1(1), 13–17.
- Cahyono, M., Syamsuar, D., Atika, L., Negara, E. S., & Kunang, Y. N. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Internet Desa Di Kabupaten Musi Rawas (Studi Kasus Desa Ngadirejo). *JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas)*, 6(2), 144–158.
- Fachrunisa, R., Susanti, G., & Yani, A. A. (2021). Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar | *Development Policy and Management Review (DPMR)*. *Development Policy and Management Review*, 1(2), 108–128.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government* dan pelayanan publik (studi tentang elemen sukses pengembangan *e-government* di pemerintah kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 32–42.
- Poerwanti, S. D., Makmun, S., & Dewantara, A. D. (2024). Jalan Panjang Menuju Inklusi Digital bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Pendahuluan. 7(1), 44–55.
- Rusito. (2021). Teknologi Internet, Dasar Internet, *Internet of Things (IOT)* dan Bahasa HTML. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Septiani, T. D. (2020). Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Jakarta Selatan. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Wulansari, D. (2021). Pengaruh Internet Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Sma Negeri 1 Trimurjo Lampung Tengah.